

KONTRIBUSI KERAJAAN ACEH TERHADAP PERKEMBANGAN LEMBAGA DAN SISTEM PENDIDIKAN ISLAM DI SUMATERA

Sri Wahyuni¹, Rezki Amelya², Idrus Latif³

^{1,2} Pendidikan Agama Islam, Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

³ Dosen PBA Pascasarjana, Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

Email: sw2501292@gmail.com, rezkiamelya336@gmail.com

idruslatif.iainbone@gmail.com

Abstract

This study examines the contribution of Kerajaan Aceh to the development of Islamic organizations and educational systems in Sumatera, with a historical focus on traditional dayah, mosque, and ulama organizations, as well as on curriculum elements, teaching methods, and the role of the sultan in education. This study used a kualitatif pustaka research methodology to examine articles and books related to Acehnese history, the structure of the Islamic education organization in Aceh, the mechanisms of knowledge acquisition, and the impact of kerajaan policies on the formalization of Islamic education. The thematic results indicate that Aceh's dayah, rangkang, meunasah, surau, and mosque institutions serve as places of education, moral culture, and dakwah that significantly contribute to the advancement of knowledge in the Nusantara region. The context of "Serambi Mekkah" originated from the Acehnese ulama and the sultan's surroundings in the formation of educational institutions, as well as a curriculum that connects traditional knowledge with modern education in later times. This article also highlights the differences in opinions regarding the level of modernization of the Dayah Pasca political reform in Aceh.

Keywords: Aceh Kingdom, Dayah, Islamic Education, Curicullum, Sumatra

Abstrak

Studi ini menyelidiki kontribusi Kerajaan Aceh terhadap perkembangan institusi dan sistem pendidikan Islam di Sumatera. Studi ini berfokus pada lembaga tradisional seperti dayah, masjid, dan ulama, serta komponen kurikulum, teknik pengajaran, dan peran sultan dalam mengatur pendidikan. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan hasil dari jurnal dan buku ilmiah yang membahas historiografi Aceh, bagaimana lembaga pendidikan Islam di Aceh disusun, mekanisme penyebaran ilmu, dan bagaimana kebijakan kerajaan memengaruhi formalisasi pendidikan Islam. Hasil tematik menunjukkan bahwa dayah, rangkang, meunasah, surau, dan institusi masjid di Aceh menjadi pusat dakwah, pengajaran, dan kultivasi moral yang berkontribusi besar pada penyebaran ilmu di wilayah Nusantara. Konteks "Serambi Mekkah" muncul dari peran ulama Aceh dan dukungan sultan dalam memformalkan lembaga pendidikan. Ini juga memicu dinamika kurikulum yang menggabungkan pengajaran modern dengan tradisi kitab kuning. Selain itu, artikel ini mengkaji pendapat yang berbeda tentang tingkat modernisasi lembaga Dayah di Aceh setelah reformasi politik.

Kata Kunci: Kerajaan Aceh, Dayah, Lembaga Pendidikan Islam, Kurikulum, Sumatera

A. PENDAHULUAN

Dalam literatur sejarah Islam Nusantara, Aceh telah lama dikenal sebagai pusat akademik dan budaya yang memiliki pengaruh regional dan internasional. Dalam konteks Sumatra, Aceh memainkan peran penting dalam penyebaran Islam melalui lembaga pendidikan tradisional seperti dayah, rangkang, meunasah, dan masjid, yang berfungsi sebagai pusat dakwah, pendidikan, dan budaya (Dayah sebagai pusat kebudayaan dan pendidikan; Aceh sebagai Serambi Mekkah). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa lembaga-lembaga ini menjadi wahana utama penyebaran ilmu, pembentukan ulama, serta mobilisasi sosial keagamaan di Aceh.) (Maskuri et al., 2020; Nursyarief, 2014; Sarkowi & Akip, 2019)

Konteks historis Aceh yang berkaitan dengan pemerintahan ulama dan sultan menunjukkan bagaimana lembaga pendidikan Islam didirikan dan berkembang atas dukungan kebijakan kerajaan dan patronase ulama terkenal. Sultan tidak hanya bertindak

sebagai pemimpin politik; mereka juga menjaga harta benda, mengatur sumber daya, dan membantu menyebarkan ajaran Islam di pemerintahan dan masyarakat. Konsep "Serambi Mekkah" menegaskan bahwa Aceh adalah negara dengan tradisi keilmuan Islam yang kuat, yang menghasilkan peran ulama sebagai tokoh kebijakan dan guru massal.) (Maskuri et al., 2020; Nursyarief, 2014; Sarkowi & Akip, 2019)

Penelitian ini sangat penting untuk menempatkan Aceh dalam kerangka historis pendidikan Islam Nusantara. Penelitian ini akan mengurai bagaimana lembaga-lembaga tradisional beradaptasi dengan perubahan kebijakan di masa pra-kolonial, kolonial, dan pasca-kemerdekaan, serta bagaimana dinamika kurikulum dan strategi pengajaran berkembang. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk membuat kerangka analitis yang menghubungkan budaya lokal, institusional, dan politik pendidikan Islam di Aceh dengan pola pendidikan Islam yang umum di Sumatera. (Almagribi & Muslimah, 2021; Fitriah, 2020; Haluty, 2016; Nursyarief, 2014)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi Kerajaan Aceh terhadap pembentukan dan pengembangan lembaga pendidikan Islam tradisional di Aceh (dayah, rangkang, meunasah, surau) serta peran masjid sebagai pusat pembelajaran, menganalisis bagaimana sistem pendidikan Islam Aceh dipengaruhi oleh kebijakan sultan, struktur kelembagaan, kurikulum, dan metode pengajaran, serta memetakan peran ulama Aceh dalam penyebaran ilmu, Serta mengintegrasikan temuan-temuan historis dengan teori-teori tentang pendidikan Islam Nusantara, serta menimbang nuansa modernisasi dan kebijakan regional pasca reformasi di Aceh.

B. PELAKSAAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan jenis studi pustaka ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis konsep dan data historis terkait kontribusi Kerajaan Aceh terhadap perkembangan lembaga dan sistem pendidikan Islam di Sumatra. Melalui studi pustaka, peneliti dapat mengkaji secara mendalam berbagai sumber ilmiah yang relevan.

Penelitian ini menggunakan sumber data dari jurnal ilmiah dan buku-buku yang membahas sejarah pendidikan Islam di Aceh, termasuk penelitian tentang lembaga pendidikan tradisional seperti dayah, surau, meunasah, dan rangkang. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan dan pemerintahan di Aceh, seperti Qanun Aceh dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, serta berbagai kajian historis yang menempatkan Aceh sebagai pusat keilmuan Islam di Nusantara

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis tematik. Artinya, tema-tema utama yang berkaitan dengan hubungan antara lembaga pendidikan Islam tradisional, dinamika kurikulum, dan penyebaran ilmu pengetahuan di wilayah Sumatra diidentifikasi, dikelompokkan, dan diinterpretasikan. Karya teori yang mencakup konsep kultur pendidikan, peran ulama, dan struktur kenegaraan dalam konteks Kerajaan Aceh mendukung analisis ini. Penelitian saat ini hanya menggunakan data sekunder dari studi pustaka, jadi penelitian lebih lanjut harus menggunakan data primer, seperti arsip institusional atau sumber lapangan. Ini karena penelitian ini memiliki keterbatasan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Lembaga Pendidikan Islam Tradisional di Aceh

Sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, seperti dayah, rangkang, meunasah, dan surau, berfungsi sebagai pusat dakwah, religio-kultural, dan pendidikan bagi masyarakat Aceh. Dayah berfungsi sebagai lembaga pembelajaran kitab-kitab klasik (kitab kuning) dan sebagai episentrum pembentukan ulama, yang kemudian dibawa ke seluruh Nusantara oleh alumni dayah Aceh. Proses ini membuat Aceh berfungsi sebagai "benteng" keilmuan dan pusat penyebaran ajaran Islam di Nusantara, membentuk jaringan penyebaran ilmu yang

melintasi batas wilayah.(Anam, 2017; Haluty, 2016; Maskuri et al., 2020; Sarkowi & Akip, 2019)

Di masa awal penyebaran Islam, masjid menjadi lokasi pengajaran dan pembelajaran, dengan halaqah dan majlis ta'lim sebagai metode utama pembelajaran.(Anam, 2017; Haluty, 2016; Sarkowi & Akip, 2019)

2. Sistem Pendidikan Islam Aceh

Kurikulum dan Metode Pengajaran Dayah Cot Kala dan model kurikulum Perlak atau Aceh, yang tidak membagi pendidikan agama dan umum, menunjukkan tradisi pendidikan Islam awal Aceh yang berorientasi integratif. Model kurikulum ini dianggap sebagai cikal bakal dari gagasan pendidikan Islam yang luas di Nusantara.(Mannan, 2022)

Kurikulum Dayah berubah setelah reformasi, menuju modernisasi dengan menggabungkan pendidikan umum dan meningkatkan kualitas santri melalui kebijakan pemerintah Aceh dan program dayah kontemporer. Namun, meskipun ada keinginan untuk memodernisasi, dayah tradisional tetap mempertahankan identitas kurikulum salafiah (kitab kuning).(Hasballah, 2020; Maskuri et al., 2020; Zulkhairi, 2021),

Di Aceh, ulama dayah membantu menyebarkan tradisi keilmuan ke seluruh Nusantara dengan bertindak sebagai penggerak perubahan, pendidik, dan pemimpin masyarakat.(Hasballah, 2020; Maskuri et al., 2020)

Peran Sultan dan Struktur Kepemerintahan, Sultan-Iskandar Muda dan kerangka pemerintahan Aceh menormalisasi lembaga pendidikan sebagai bagian dari kebijakan kerajaan, memanfaatkan institusi keagamaan untuk meningkatkan stabilitas internal dan legitimasi budaya Islam di wilayah Aceh dan sekitarnya.(Maskuri et al., 2020; Nursyarief, 2014)

Organisasi, pembiayaan, dan kualitas pendidikan Dayah (Dayah Salafiyah vs. Dayah Terpadu/Modern) dan hubungan antara Dayah dengan dinas pendidikan dan pemerintah daerah dipengaruhi oleh undang-undang yang membentuk kebijakan di Aceh.(Almagribi & Muslimah, 2021; Hasballah, 2020; Zulkhairi, 2021)

3. Analisis Teori dan Penelitian Terdahulu

Teori budaya pendidikan Islam Nusantara membantu menjelaskan bagaimana lembaga tradisional Islam di Aceh membentuk budaya literasi keagamaan, pola pembelajaran, dan interaksi sosial. Di Aceh, dayah, meunasah, surau, dan rangkang berfungsi sebagai saluran kulturisasi ajaran Islam yang menggabungkan bahasa Arab, kitab klasik, dan interaksi komunitas. Ini menciptakan pola halaqah dan pembelajaran berbasis komunitas yang kuat.(Anam, 2017; Haluty, 2016; Sarkowi & Akip, 2019).

Studi sejarawan menunjukkan bahwa Aceh menjadi pusat penyebaran Islam dan pengembangan ilmu di Nusantara karena kebijakan kerajaan dan ulama Sally. Ilmu ulama tersebar luas melalui jaringan madrasah dan institusi keagamaan, yang pada gilirannya melahirkan pondok pesantren di Jawa dan daerah lain di Nusantara.(Haluty, 2016; Maskuri et al., 2020; Nursyarief, 2014; Sarkowi & Akip, 2019).

Setelah reformasi, perdebatan dan pertimbangan tentang modernisasi Dayah menunjukkan dinamika antara mempertahankan identitas tradisional Dayah dan mengintegrasikan kurikulum nasional. Beberapa ulama Aceh menentang modernisasi yang berlebihan, yang mengakibatkan kehilangan identitas keislaman unik Aceh. Berbagai penelitian tentang kebijakan dayah di Aceh mendukung upaya untuk mengimbangi nilai-nilai tradisional (kitab kuning) dengan kurikulum modern.(Almagribi & Muslimah, 2021; Hasballah, 2020; Maskuri et al., 2020; Zulkhairi, 2021).

Studi tentang peran sultan dan kebijakan kerajaan Aceh menunjukkan bagaimana institusi keagamaan dan pendidikan Islam terkait erat dengan stabilitas politik dan kekuasaan.

Studi ini menekankan hubungan erat antara institusi ulama, kebijakan kerajaan, dan kemajuan pendidikan Islam di Sumatra. (Maskuri et al., 2020; Nursyarief, 2014)

4. Uniformitas Lembaga Pendidikan Islam Tradisional dengan Konteks Sumatra

Di Aceh, dayah, rangkang, meunasah, surau, dan masjid berfungsi sebagai infrastruktur sosial ekonomi keagamaan dan tempat iluminasi intelektual. Alumni Dayah Aceh berkiprah di berbagai daerah, memfasilitasi pembelajaran kitab kuno, membangun ulama, dan menyebarkan pengetahuan ke seluruh Nusantara. Sebagai pusat spiritual dan intelektual di Sumatra dan sekitarnya, peran ulama Aceh dalam membangun jaringan keilmuan dan berdakwah menjadikan Aceh sebagai pusat. (Anam, 2017; Haluty, 2016; Maskuri et al., 2020; Sarkowi & Akip, 2019)

Identitas keislaman yang diembankan sultan kepada para ulama dan komponen-komponen institusional yang saling terkait ditunjukkan oleh struktur kelembagaan Aceh (dayah-teungku chik-kadi). Legitimasi institusional Dayah dan kegiatan keagamaan ditingkatkan oleh peran sultan sebagai pelindung, pengubah, dan pendana lembaga keagamaan. (Maskuri et al., 2020; Nursyarief, 2014; Zulkhairi, 2021).

5. Kontribusi terhadap Sistem Pendidikan Islam

Kurikulum Dayah Cot Kala pada masa Perlak mengintegrasikan konten keilmuan Islam secara lebih menyeluruh, yang berdampak pada cara kurikulum Islam disusun di Aceh dan wilayah sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa, dalam konteks awal Nusantara, Aceh adalah pelopor konsep pendidikan Islam yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum. (Mannan, 2022).

Modernisasi Dayah didorong oleh reformasi dan kebijakan Aceh terkait Dayah; manajemennya menjadi lebih profesional, fasilitasnya diperbarui, dan beberapa Dayah mengadopsi kurikulum terpadu yang menggabungkan materi keagamaan dengan materi umum. Namun, penelitian menunjukkan adanya resistensi terhadap modernisasi kurikulum Dayah yang terlalu radikal untuk mempertahankan identitas Dayah dalam tradisi keilmuan Aceh. (Hasballah, 2020; Maskuri et al., 2020; Zulkhairi, 2021).

Dayah menjadi pusat kekuatan ilmiah yang memengaruhi kebijakan Islam di seluruh Nusantara, dan peran sultan dan kebijakan keraton memperkuat peran ulama dalam pengambilan keputusan pendidikan. (Maskuri et al., 2020; Nursyarief, 2014) (Maskuri et al., 2020; Nursyarief, 2014).

Kerajaan Aceh membantu lembaga pendidikan Islam di Aceh. Ini adalah bagian dari jaringan penerapan ilmu yang lebih luas di Nusantara. Sejak Kesultanan Aceh, dayah, meunasah, rangkang, dan surau telah berfungsi sebagai pusat pembelajaran kitab kuning, pembentukan ulama, dan tempat dakwah, membangun budaya keilmuan. (Nursyarief, 2014; Sarkowi & Akip, 2019)

Meunasah, tingkat pendidikan dasar di Aceh yang telah ada sejak zaman kesultanan, sangat membantu komunitas setempat mempelajari tata krama beragama dan literasi keislaman (Hasballah, 2020). Pada tingkat yang lebih kompleks, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan pemberdayaan sosial-ekonomi umat. Ini menegaskan peran mereka sebagai infrastruktur pendidikan nasional dan regional. (Mustain, 2023)

Secara teoretis, warisan pendidikan Islam Nusantara menunjukkan terpadunya tradisi lokal dengan gagasan intelektual Barat. Oleh karena itu, Aceh adalah contoh praktis bagaimana institusi tradisional dapat bertahan sambil beradaptasi dengan dinamika kebijakan kontemporer (Haluty, 2016). Kurikulum Dayah Cot Kala, yang mengintegrasikan ilmu agama dan umum, menjadi referensi historis penting untuk memahami dasar pembelajaran Islam di Aceh dan Nusantara. Dengan membuat qanun Aceh untuk menyimpan kebijakan pendidikan, sultan memperkuat legitimasi lembaga keagamaan sebagai agen pembangunan

intelektual dan menjaga identitas keislaman, yang berfungsi sebagai moderasi keagamaan di Kesultanan. (Yusuf, 2016; Z.A., 2003)

6. Analisis Nuansa: Nuansa Modernisasi vs Pelestarian Tradisi

Variasi kebijakan di antara Dayah terjadi karena konflik antara modernisasi kurikulum mereka dan pelestarian kitab kuning. Perubahan ini dipengaruhi oleh politik lokal, sumber daya, dan kecenderungan institusional. Studi tertentu menekankan kemungkinan kehilangan identitas tradisional jika modernisasi terlalu dominan, sementara studi lain menekankan bahwa Dayah dapat menjadi wadah untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pendidikan umum tanpa kehilangan tradisi kitab kuning. (Hasballah, 2020; Maskuri et al., 2020; Zulkhairi, 2021).

Bentuk Dayah (Salafiyah versus Modern atau Terpadu) dan cara pendidikan Dayah dilaksanakan di Aceh dipengaruhi oleh konteks Otonomi Khusus Aceh dan kebijakan Qanun Aceh. Ini mendorong sistem pendidikan yang menggabungkan tradisi Dayah dengan pendidikan umum nasional. Hal ini menunjukkan reaksi adaptif terhadap perubahan politik di Aceh dan pengaruh mereka terhadap lembaga pendidikan Islam lokal. (Almagribi & Muslimah, 2021; Hasballah, 2020; Zulkhairi, 2021).

D. PENUTUP

Simpulan

Kerajaan Aceh memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan lembaga dan sistem pendidikan Islam di Sumatera melalui penguatan lembaga pendidikan tradisional seperti dayah, meunasah, rangkang, surau, dan masjid. Dukungan sultan serta peran ulama menjadikan Aceh sebagai pusat penyebaran ilmu Islam di Nusantara dengan sistem pendidikan yang memadukan dakwah, pembentukan akhlak, dan pengajaran kitab-kitab Islam. Selain itu, perkembangan kurikulum dan modernisasi dayah menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Aceh mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan identitas tradisionalnya sebagai pusat keilmuan Islam.

Saran

Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengembangkan warisan pendidikan Islam peninggalan Kerajaan Aceh sebagai bagian penting dari sejarah pendidikan Islam di Nusantara. Penguatan kualitas dayah, peningkatan sumber daya pendidikan, serta pelestarian tradisi keilmuan Islam perlu dilakukan agar lembaga pendidikan Islam di Aceh tetap mampu menjadi pusat pembinaan ilmu, akhlak, dan dakwah di tengah perkembangan zaman dan tantangan modernisasi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Almagribi, A. B., & Muslimah, M. (2021). Implementasi Hubungan Ilmu, Budaya, dan Ekonomi pada Lembaga Pendidikan Islam Indonesia. *Anthropos Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 7(1), 28. <https://doi.org/10.24114/antro.v7i1.24265>
- Anam, S. (2017). Karakteristik dan Sistem Pendidikan Islam: Mengenal Sejarah Pesantren, Surau dan Meunasah di Indonesia. *Journal of Applied Linguistics and Islamic Education, I(I)*. <https://doi.org/10.33754/jalie.v1i1.52>
- Fitriah, A. (2020). Identitas Islam dan Pendidikan di Era Otonomi Khusus Aceh. *Edukasi Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 18(1), 1–18. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v18i1.626>
- Haluty, D. (2016). Warisan Pendidikan Islam Nusantara: Suatu Perubahan dan Keberlangsungan. *Al-Ulum*, 16(1), 208. <https://doi.org/10.30603/au.v16i1.163>

- Hasballah, M. (2020). Meunasah : Lembaga Pendidikan Islam Tradisional Aceh. *At-Tafkir*, 13(2), 173–186. <https://doi.org/10.32505/at.v13i2.1848>
- Mannan, M. (2022). Pengembangan Kurikulum Dayah Cot Kala pada Era Kerajaan Perlak, Aceh. *Islamijah Journal of Islamic Social Sciences*, 3(1), 31. <https://doi.org/10.30821/islamijah.v3i1.11229>
- Maskuri, Riza, M., & Subardi, S. (2020). Quo Vadis Lembaga Pendidikan Dayah Pasca Kemerdekaan dan Pasca Reformasi. *Jurnal As-Salam*, 4(2), 284–300. <https://doi.org/10.37249/as-salam.v4i2.223>
- Mustain, M. (2023). Dinamika Fungsi Masjid di Indonesia: dari Lokus Pengajaran Islam ke Pemberdayaan Sosial Ekonomi Umat. *El-Hikmah Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 17(2), 109–121. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v17i2.8998>
- Nursyarief, A. (2014). Pendidikan Islam di Indonesia dalam Lintasan Sejarah (Perspektif Kerajaan Islam). *Lentera Pendidikan Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 17(2), 256–271. <https://doi.org/10.24252/lp.2014v17n2a8>
- Sarkowi, S., & Akip, M. (2019). Kulturasi Ajaran Islam Melalui Sistem dan Lembaga Pendidikan Islam pada Masyarakat Masa Kesultanan di Nusantara. *Sindang Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah*, 1(2), 36–53. <https://doi.org/10.31540/sdg.v1i2.318>
- Yusuf, C. F. (2016). Kesultanan Nusantara dan Faham Keagamaan Moderat di Indonesia. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 14(2), 457. <https://doi.org/10.31291/jlk.v14i2.508>
- Z.A., H. M. S. (2003). Pendidikan Islam di Kesultanan Aceh. *Al Qalam*, 20(96), 125. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v20i96.655>
- Zulkhairi, T. (2021). Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Meningkatkan Mutu Pendidikan Dayah Tradisional di Aceh. *Edukasi Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 19(2), 171–187. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v19i2.688>